

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agustinus, Sonny dan Isnianto Kurniawan, 2009, *Panduan Praktis Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Al Rashid, Harun, 1987, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)*, Yudhistira, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Budijaya, Nyoman, 1987, *Catatan Sipil Di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis*, Bina Indra Karya, Surabaya.
- Bushar, Muhammad, 1988, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati, 2014, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, Andi, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Sumarjati, 1989, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasan, M.Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mamuji, Sri, dkk., 2005, *Metode Penelitian dan Tesis*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Andi, Yogyakarta.
- Mertokusuma, Sudikno, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Bushar, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mustofa, 2017, *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, KaryaMedia, Yogyakarta.
- Utomo, Laksanto, 2016, *Hukum Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Parangin, Effendi, 1993, *Hukum Agrarian di Indonesia*, Raja Grasindo Persada, Jakarta.
- Poerwardaminta, WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Rusjdi, Muhammad, 2007, *PPH Pajak Penghasilan Edisi Keempat*, PT Index, Klaten.
- S, Djaja, Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Said, Umar, Sugiharto, Suratman, dkk, 2015, *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Setara Press, Malang.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 344-355.
- Saragih, Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta.

Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.

Soeroso, R, 2003, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Wibawanti, Erna dan Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah & Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Wahyutomo, Imam, 1994, *Pajak*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan serta perubahannya.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan menurut PER 18/PJ/2017 tanggal 2 November 2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/ atau bangunan beserta perubahannya

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-74/PJ/2015 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 P/HUM/2013 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan kewajiban perpajakan Direktur Jenderal Pajak.

C. Tesis

Devy, Luh Larasati, “Freies Ermessen Dinas Pendapatan Daerah Tentang Verifikasi Nilai Objek Pajak Dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Badung”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Mosleminov, Osez, “Analisis Transisi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Dalam Hal Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Wibisono, Arif, “Implikasi Perbedaan Antara Nilai Transaksi Dalam Akta Dengan Nilai Transaksi Berdasarkan Penelitian Pajak Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

D. Majalah/ Jurnal

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Ditjen Pajak D.I. Yogyakarta, 2018, *Bijak Bina Pajak Kanwil Ditjen Pajak DIY Edisi 06*, Kanwil Ditjen Pajak DIY, Yogyakarta.

Maria S.W. Sumardjo (Selanjutnya disebut Maria S.W. Sumardjono IV), Yogyakarta, 1993, *Aspek Teoritis Peralihan Hak atas Tanah Menurut UUPA*, Majalah Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, No. 18/X/93.

Ovelia Veradina Imbing, 2013, “*Analisis Penetapan NJOP dan Implikasi terhadap penerimaan PBB di Kota Manado*”, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA) Vol. 1 No. 3.

E. Data Elektronik

Murjiyanto dan Samun Ismaya, “*Menetapkan Pilihan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Dasar Penghitungan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan*”, <https://media.neliti.com/media/publications/85269-ID-menetapkan-pilihan-nilai-jual-obyek-paja.pdf>, tanggal 7 januari 2019

Setiyo, Hn, “*Teori dan Konsep Dasar Negara*”, <https://www.ajarekonomi.com/2016/07/teori-dan-konsep-dasar-negara.html>, tanggal 8 Maret 2019.

Shera, “*Nilai Jual Objek Pajak Untuk Single Value For Multipurposes*”, *Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan*, <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/24590-nilai-jual-objek-pajak-untuk-single-value-for-multipurposes>, tanggal 28 Januari 2019

F. Wawancara

Hitaprana, 2018, PPAT Kabupaten Sleman, *Wawancara*, Sleman, 12 Desember.

Lhora Widyaresti, 2019, Staff Pelayanan Kantor Pajak Daerah Kabupaten Sleman, *Informasi*, Sleman, 25 Januari

Mustofa, 2018, PPAT Kota Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 6 Juni.

Nurhadi Darussalam, 2018, PPAT Kabupaten Sleman, *Wawancara*, Sleman, 13 Desember.

Triniken Tiyas Tirlin, 2019, PPAT Kabupaten Sleman, *Wawancara*, Sleman, 31 Januari.